



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Januari 2013

Halaman: 2

Jamkesta Coba Ditiru Pemkab Langkat

JOGJA -- Sistem perlindungan jaminan kesehatan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan coba ditiru oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Sumatera Utara, setelah delegasi DPRD Kabupaten Langkat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke DPRD Kota Jogja, Senin (21/1) siang.

Rombongan DPRD Langkat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Langkat Drs H Abdul Khair MM ini berniat mempelajari sistem kesehatan yang ada di Kota Jogja, khususnya program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang efektif berlaku di tahun 2013 ini.

Selain itu, mereka juga hendak mempelajari penanganan permasalahan anak dan pendidikan yang sudah diterapkan di Kota Jogja.

Anggota DPRD Kota Jogja dari PDIP, Sujanarko, menjelaskan Pemkot Jogja mengucurkan dana talangan sebesar Rp 7.500 per jiwa setiap bulannya. "Biaya sebesar Rp 7.500 dikalikan 12 bulan dan menjangkau sekitar 310.000 penduduk Kota Jogja yang ber-KTP," kata pria yang akrab disapa Koko itu.

Total dana APBD yang dikucurkan Pemkot, lanjut Koko, untuk program Jamkesta sebesar Rp 27 miliar per tahun. "Jamkesta ini tidak membedakan miskin atau kaya yang penting dia memiliki KTP atau C-1, maka bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis," paparnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Tri Mardoyo dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja. Tri mengungkapkan program

Jamkesta bersifat *universal coverage* dan tidak membedakan warga yang ada.

Rombongan DPRD Langkat pada Senin siang diterima oleh tiga anggota DPRD Kota Jogja yaitu Sujanarko, Fathiyatul Fitri dan M Hasan Widagdo serta beberapa stakeholder dari sejumlah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot.

Sementara itu Fathiyatul Fitri mengungkapkan Pemkot Jogja telah menerapkan sejak lama program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. DPRD bahkan telah mendorong agar siswa-siswi dari keluarga miskin mendapat prioritas bantuan pendidikan

lewat mekanisme Keluarga Menuju Sejahtera (KMS). "Memang tidak semua APBD kita diarahkan untuk pendidikan gratis, karena itu akan membentangi profil APBD. Tapi kami memberi komitmen untuk warga yang tidak mampu tetap harus bisa menyelesaikan Wajar 12 tahun," ujar politisi asal Partai Golkar ini. (ros)



BERI PENJELASAN -- Tri Mardoyo dari Dinkes Kota Jogja memberi penjelasan terkait sistem kesehatan yang tertuang dalam program Jamkesta kepada rombongan DPRD Kabupaten Langkat, Senin (21/1) siang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005